Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Desember 2026, 12 (12.A), 106-118
DOI: https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/15088
p-ISSN: 2622-8327 e-ISSN: 2089-5364
Accredited by Directorate General of Strengthening for Research and Development
Available online at https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP

Teori Paradigma Fakta Sosial Dalam Pendidikan Islam

Syifa Azzahra[1] , Annida Siti Sayyidah Fathurrohmah [2], Lilik Aminah[3]

[1,2] Mahasiswa Program Studi Pascasarjana Pendidikan Agama Islam Universitas Islam International Darullughah Wadda'wah
[3]Dosen Universitas Islam International Darullughah Wadda'wah

Received: 14 November 2026
Revised: 21 November 2026
Accepted: 08 Desember 2026

Abstract

Pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada pengembangan intelektual, tetapi juga pembentukan karakter, moral, dan perilaku sosial berdasarkan nilai-nilai keislaman. Penelitian ini bertujuan mengkaji paradigma fakta sosial dalam perspektif sosiologi pendidikan Islam, pemikiran para tokoh terkait, serta penerapannya dalam memahami fenomena pendidikan Islam kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui kajian terhadap buku, jurnal, dan karya tokoh sosiologi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradigma fakta sosial Émile Durkheim memiliki keterkaitan erat dengan pendidikan Islam sebagai lembaga sosial yang menanamkan norma, nilai, dan keteraturan melalui pembiasaan ibadah, disiplin, penghormatan kepada guru, dan tata tertib sekolah. Pemikiran Auguste Comte, Karl Marx, Lewis Coser, dan Ibnu Khaldun turut memperkuat pemahaman mengenai hubungan antara masyarakat dan pendidikan. Permasalahan seperti menurunnya disiplin dan etika peserta didik tidak hanya disebabkan faktor individu, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan sosial dan melemahnya kontrol norma. Oleh karena itu, penguatan pendidikan Islam memerlukan sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam membentuk karakter peserta didik.

Kata Kunci: *paradigma fakta sosial, sosiologi pendidikan Islam, karakter peserta didik.*

(*) Corresponding Author: syipaazzahra24@gmail.com annidasayyidah06@gmail.com lilikaminah@uiidalwa.ac.id

How to Cite: Azzahra, S., Fathurrohmah, A., & Aminah, L. (2026). Teori Paradigma Fakta Sosial Dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *12*(12.A), 106-118. Retrieved from https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/15088.

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam merupakan proses pembinaan yang bertujuan membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia berdasarkan ajaran Islam. Dalam implementasinya, pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan (transfer of knowledge), tetapi juga pada pembentukan karakter, moral, serta perilaku sosial peserta didik melalui internalisasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pendidikan Islam memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan sosial masyarakat karena proses pendidikan berlangsung dalam lingkungan sosial yang sarat dengan norma, nilai, dan budaya.[1]

[1] Alihan Sastra, dkk., *Hakikat Dasar dan Tujuan Pendidikan Islam*, Jurnal Pendidikan Nusantara, Vol. 2, No. (2025)

Kajian mengenai hubungan antara pendidikan dan masyarakat dapat dianalisis melalui perspektif sosiologi. George Ritzer mengemukakan bahwa sosiologi memiliki tiga paradigma utama, yaitu paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial.[2] Ketiga paradigma tersebut memberikan sudut pandang yang berbeda dalam menjelaskan hubungan antara individu dan masyarakat. Di antara ketiganya, paradigma fakta sosial memiliki relevansi yang kuat dalam mengkaji pendidikan Islam karena menempatkan masyarakat sebagai kekuatan yang memengaruhi pembentukan perilaku individu.

Paradigma fakta sosial diperkenalkan oleh Émile Durkheim yang memandang bahwa norma, nilai, tradisi, dan berbagai aturan sosial merupakan fakta objektif yang berada di luar individu, tetapi memiliki daya paksa terhadap perilaku manusia.[3] Dalam konteks pendidikan Islam, fakta sosial tercermin dalam berbagai bentuk budaya sekolah seperti penerapan tata tertib, pembiasaan ibadah berjamaah, budaya disiplin, penghormatan kepada guru, serta pembentukan akhlak melalui aktivitas pendidikan yang berlangsung secara berkelanjutan. Lingkungan pendidikan tersebut menjadi media internalisasi nilai-nilai sosial dan keagamaan yang membentuk karakter peserta didik.

Selain Durkheim, sejumlah pemikir lain seperti Auguste Comte, Karl Marx, dan Ibnu Khaldun juga memberikan kontribusi penting dalam perkembangan teori sosial. Meskipun memiliki perspektif yang berbeda, pemikiran mereka memberikan landasan teoritis dalam memahami hubungan antara masyarakat, pendidikan, dan perubahan sosial. Oleh sebab itu, teori-teori tersebut menjadi rujukan penting dalam menganalisis dinamika pendidikan Islam sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat.

Di sisi lain, berbagai persoalan pendidikan masih menjadi tantangan, seperti rendahnya kedisiplinan peserta didik, menurunnya kepedulian sosial, lemahnya penghormatan terhadap guru, serta kurang optimalnya kepatuhan terhadap tata tertib sekolah.[4] Fenomena tersebut menunjukkan bahwa proses internalisasi nilai-nilai sosial dan keagamaan belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Dalam perspektif paradigma fakta sosial, permasalahan tersebut dapat dipahami sebagai akibat dari melemahnya pengaruh norma dan kontrol sosial dalam lingkungan pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, paradigma fakta sosial menjadi pendekatan yang relevan dalam menganalisis berbagai fenomena pendidikan Islam, khususnya dalam memahami bagaimana lingkungan sosial membentuk karakter dan perilaku peserta didik. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan mengkaji konsep paradigma fakta sosial dalam perspektif sosiologi pendidikan Islam, menguraikan pemikiran para tokohnya, serta menganalisis implementasinya dalam berbagai fenomena pendidikan Islam kontemporer.

---

[2] George Ritzer, *Sociological Theory*, 9th ed. (New York: McGraw-Hill Education, 2013), hlm. 33–39; lihat juga Wagiyo, dkk., *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2011)

[3] Émile Durkheim, *The Rules of Sociological Method*, trans. W. D. Halls (New York: The Free Press, 1982), hlm. 50–59; Ariffudin M. Arif, "Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim dalam Sosiologi Pendidikan," *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 1, No. 2 (2020)

[4] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Profil Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Kemendikbudristek, edisi terbaru), atau sumber penelitian yang membahas penurunan disiplin dan karakter peserta didik.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) guna memahami, menafsirkan, dan menganalisis konsep-konsep teoritis serta fenomena pendidikan Islam secara mendalam. Data penelitian diperoleh melalui dua sumber utama, yakni data primer yang berasal dari karya-karya orisinal para tokoh sosiologi dan pemikir pendidikan terkait paradigma fakta sosial, serta data sekunder yang berupa buku-buku sosiologi pendidikan, artikel ilmiah, jurnal penelitian, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan dinamika pendidikan Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mencatat, dan menyeleksi literatur yang berkaitan dengan topik paradigma fakta sosial dalam perspektif sosiologi pendidikan Islam. Selanjutnya, analisis data dilakukan melalui langkah-langkah sistematis, mulai dari reduksi data untuk memfokuskan pembahasan, interpretasi data guna menafsirkan pemikiran para tokoh dalam konteks pendidikan kontemporer, serta analisis deskriptif untuk menguraikan temuan penelitian. Terakhir, proses penelitian diakhiri dengan penarikan kesimpulan guna merumuskan jawaban mengenai keterkaitan antara struktur sosial, norma, dan pembentukan karakter peserta didik di lingkungan pendidikan Islam berdasarkan teori-teori yang telah dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembagian Paradigma dalam Sosiologi

Paradigma merupakan kata serapan dari bahasa Latin, yaitu *paradigma*, yang berarti model atau pola. Istilah ini juga berasal dari bahasa Yunani, yakni *para* yang berarti "berdampingan" atau "membandingkan", serta *deiknunai* yang berarti "memperlihatkan".[5] Dari pengertian tersebut bahwa paradigma dapat dimaknai sebagai cara seseorang memandang dirinya sendiri maupun lingkungan di sekitarnya. Cara pandang tersebut kemudian memengaruhi pola pikir, sikap, serta perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Paradigma merupakan cara dasar seseorang dalam memahami, memandang, menilai, dan bertindak terhadap suatu hal, terutama yang berkaitan dengan kenyataan atau realitas yang dihadapinya.[6] Paradigma sangat penting karena menjadi landasan dalam menentukan bagaimana seseorang berpikir dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Thomas Kuhn, paradigma adalah pola atau model yang menjadi pedoman bersama dalam kegiatan ilmiah, seperti teori, hukum, dan metode penelitian.[7] Paradigma dalam sosiologi merupakan cara pandang atau kerangka berpikir yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial dalam masyarakat. Paradigma menjadi dasar bagi para sosiolog dalam menentukan objek kajian, metode penelitian, serta cara memahami realitas sosial. Dalam perkembangan ilmu

[5] Marilang, Elsa Wildia Bahar, "Paradigma dan Konsep Integrasi Ilmu," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 12 (2024).
[6] Muslim, "Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode dan Jenis Penelitian dalam Ilmu Komunikasi," *Wahana*, Vol. 10, No. 1 (2015).
[7] Akhyar Yusuf, "Paradigma Ilmiah pada Sosial-Budaya Kontemporer," *Jurnal Kajian Budaya*, Vol. 1, No. 2 (2011).

sosiologi, terdapat beberapa paradigma utama yang digunakan oleh para ahli untuk menganalisis kehidupan sosial.[8]

Menurut George Ritzer, paradigma sosiologi dibagi menjadi tiga paradigma besar, yaitu paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial.[9] Ketiga paradigma tersebut memiliki fokus kajian dan pendekatan yang berbeda dalam memahami masyarakat. Fungsi paradigma adalah sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam memahami suatu masalah atau realitas. Paradigma membantu seseorang menentukan cara pandang, metode, serta langkah yang digunakan dalam menyusun teori, melakukan penelitian, dan mengambil keputusan.[10]

Berdasarkan penjelasan di atas, paradigma dapat disimpulkan sebagai cara pandang atau pola pikir yang menjadi dasar seseorang dalam memahami realitas, berpikir, bersikap, dan bertindak. Paradigma juga berperan penting sebagai pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penyelesaian masalah.

Menurut Ritzer (2005) dan Gofman, paradigma dalam teori sosial dibagi menjadi tiga jenis utama, yaitu paradigma fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial.[11] Paradigma fakta sosial menekankan bahwa kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh struktur sosial, norma, dan aturan yang berada di luar diri individu. Paradigma definisi sosial lebih fokus pada cara individu memberi makna dan memahami tindakan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, paradigma perilaku sosial melihat perilaku manusia sebagai hasil respons terhadap rangsangan atau pengaruh dari lingkungan sekitarnya.

Paradigma Fakta Sosial Paradigma fakta sosial dipelopori oleh Emile Durkheim. Paradigma ini memandang bahwa masyarakat memiliki kenyataan objektif yang berada di luar individu dan mampu memengaruhi perilaku manusia. Fakta sosial berupa norma, nilai, adat istiadat, hukum, serta struktur sosial dianggap sebagai sesuatu yang nyata dan memiliki kekuatan memaksa terhadap individu.[12] Dalam paradigma ini, individu dipandang sebagai bagian dari sistem sosial yang perilakunya dibentuk oleh lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian sosiologi harus mempelajari struktur sosial dan institusi masyarakat secara objektif menggunakan metode ilmiah.[13] Paradigma fakta sosial melahirkan beberapa teori sosiologi, seperti teori struktural fungsional dan teori konflik. Teori struktural fungsional menjelaskan bahwa masyarakat terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan untuk menciptakan keteraturan sosial. Sementara itu, teori konflik memandang masyarakat sebagai arena pertentangan kepentingan antar kelompok sosial.[14] Dalam bidang pendidikan, paradigma fakta sosial melihat sekolah sebagai lembaga sosial yang berfungsi menanamkan norma, nilai, dan keteraturan sosial

[8] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 28.
[9] George Ritzer, *Sociology: A Multiple Paradigm Science* (Boston: Allyn and Bacon, 1975), hlm. 12.
[10] Noveri Faikar Urfan, et al., "Paradigma Dasar dalam Kajian Ilmu Sosial," Vol. 2, No. 1 (2024).
[11] Abdul Malik dan Aris Dwi Nugroho, "Menuju Paradigma Penelitian Sosiologi yang Interaktif," *Sosiologi Reflektif*, Vol. 10, No. 2 (2016).
[12] Emile Durkheim, *The Rules of Sociological Method* (New York: Free Press, 1982), hlm. 50.
[13] Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* (Jakarta: Gramedia, 1994), hlm. 104.
[14] George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 80.

kepada peserta didik agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis.[15] Paradigma fakta sosial merupakan cara bertindak, berpikir, atau berperilaku yang berlaku dalam masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis, dan dapat memengaruhi atau mengikat individu dari luar dirinya. Fakta sosial juga bersifat umum karena berlaku dalam suatu kelompok masyarakat serta memiliki keberadaan sendiri di luar tindakan individu.[16]

Paradigma Definisi Sosial Paradigma definisi sosial dikembangkan oleh Max Weber. Paradigma ini menekankan bahwa tindakan manusia memiliki makna subjektif yang harus dipahami melalui sudut pandang pelaku sosial itu sendiri. Fokus utama paradigma ini adalah bagaimana individu memberikan makna terhadap tindakan dan interaksi sosial yang mereka lakukan.[17] Menurut Weber, sosiologi harus memahami tindakan sosial melalui pendekatan *verstehen*, yaitu memahami makna tindakan dari perspektif individu yang melakukannya. Oleh sebab itu, penelitian sosial tidak cukup hanya melihat fakta objektif, tetapi juga harus memahami motif, tujuan, dan pengalaman subjektif manusia.[18] Paradigma definisi sosial melahirkan beberapa teori, seperti interaksionisme simbolik dan fenomenologi sosial. Interaksionisme simbolik menjelaskan bahwa manusia berinteraksi menggunakan simbol-simbol yang memiliki makna tertentu, seperti bahasa, gerakan, dan tanda sosial lainnya.[19]

Dalam konteks pendidikan, paradigma definisi sosial memandang proses belajar sebagai hasil interaksi antara guru dan peserta didik. Makna, komunikasi, dan pengalaman sosial menjadi bagian penting dalam pembentukan perilaku siswa.[20] Paradigma definisi sosial adalah cara pandang dalam ilmu sosial yang menekankan bahwa manusia merupakan individu aktif yang memberi makna terhadap tindakan dan kehidupan sosialnya. Paradigma ini fokus pada bagaimana seseorang memahami, menafsirkan, dan membentuk realitas sosial melalui interaksi dengan orang lain.[21]

Paradigma Perilaku Sosial Paradigma perilaku sosial dipengaruhi oleh pemikiran behaviorisme dan dikembangkan oleh tokoh seperti B. F. Skinner. Paradigma ini memandang bahwa perilaku manusia merupakan respons terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan sosial.[22] Paradigma perilaku sosial menekankan bahwa tindakan manusia dapat diamati secara nyata dan diukur secara objektif. Perilaku individu dianggap terbentuk melalui proses pembelajaran, pemberian penghargaan (*reward*), dan hukuman (*punishment*). Oleh karena itu, lingkungan sosial memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku manusia.[23]

---

[15] S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 34.
[16] Revita Ika, "Paradigma Fakta Sosial dalam Pendidikan Karakter Jujur pada Peserta Didik SMPIT Insan Kamil Karanganyar," *Sosialitas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Sosiologi-Antropologi* (2015).
[17] Max Weber, *Economy and Society* (California: University of California Press, 1978), hlm. 4.
[18] George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 38.
[19] Herbert Blumer, *Symbolic Interactionism: Perspective and Method* (California: University of California Press, 1969), hlm. 2.
[20] S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 59.
[21] Happy Susanto, "Konsep Paradigma Ilmu-ilmu Sosial dan Relevansinya bagi Perkembangan Pengetahuan," *Jurnal Muaddib*, Vol. 4, No. 2 (2014).
[22] B. F. Skinner, *Science and Human Behavior* (New York: Macmillan, 1953), hlm. 65.
[23] George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 210.

Dalam paradigma ini, interaksi sosial dipahami sebagai hubungan stimulus dan respons. Individu akan cenderung mengulangi perilaku yang memberikan keuntungan dan menghindari perilaku yang menimbulkan hukuman.[24] Dalam bidang pendidikan, paradigma perilaku sosial terlihat dalam penerapan sistem penghargaan dan hukuman di sekolah. Guru menggunakan pujian, nilai, maupun sanksi sebagai cara membentuk perilaku disiplin dan meningkatkan motivasi belajar peserta didik.[25]

Paradigma perilaku sosial adalah paradigma yang dikembangkan oleh B. F. Skinner dengan pendekatan behavioristik. Paradigma ini melihat bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan dan dapat diamati secara nyata. Menurutnya, kajian ilmu sosial harus fokus pada perilaku manusia yang terlihat dan dapat dipelajari secara ilmiah. Paradigma ini melahirkan Teori Behavioral Sociology dan Teori Exchange.[26]

Berdasarkan penjelasan di atas, ketiga paradigma memiliki perbedaan dalam melihat kehidupan sosial. Paradigma fakta sosial menekankan pengaruh masyarakat terhadap individu, paradigma definisi sosial fokus pada makna tindakan sosial, sedangkan paradigma perilaku sosial melihat perilaku manusia sebagai pengaruh lingkungan. Pembagian paradigma dalam sosiologi menunjukkan bahwa masyarakat dapat dipahami melalui berbagai sudut pandang. Paradigma fakta sosial menekankan kekuatan struktur sosial terhadap individu, paradigma definisi sosial menyoroti makna subjektif tindakan manusia, sedangkan paradigma perilaku sosial memfokuskan pada hubungan stimulus dan respons dalam perilaku manusia. Ketiga paradigma tersebut saling melengkapi dalam memahami kehidupan sosial secara lebih luas dan mendalam.[27]

Paradigma Fakta Sosial dalam Pendidikan Islam

Paradigma fakta sosial merupakan salah satu paradigma dalam sosiologi yang memandang bahwa kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh norma, nilai, aturan, dan lembaga sosial yang berada di luar individu. Paradigma ini dikemukakan oleh Émile Durkheim yang menjelaskan bahwa fakta sosial memiliki kekuatan memaksa terhadap individu sehingga individu cenderung mengikuti aturan yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut Sedgewick, fakta sosial adalah aktivitas individu yang memengaruhi kehidupan masyarakat, seperti dalam bidang ekonomi, hukum, politik, dan agama. Aktivitas tersebut dilakukan secara sadar, tetapi tetap dipengaruhi oleh tekanan atau aturan dari luar diri individu sehingga seseorang merasa terikat untuk bertindak sesuai dengan norma yang berlaku.

Adapun menurut Edgar, fakta sosial merupakan cara pandang atau paradigma individu dalam menjalani kehidupan sosial di masyarakat.Fakta sosial juga memberikan pedoman, baik secara teori maupun praktik, dalam menentukan perilaku seseorang di lingkungan sosialnya.

Dalam pendidikan Islam, paradigma fakta sosial dapat dilihat melalui berbagai aturan dan kebiasaan yang diterapkan di lingkungan sekolah, madrasah,

[24] B. F. Skinner, *Beyond Freedom and Dignity* (New York: Knopf, 1971), hlm. 27.
[25] S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 77.
[26] Mustaqim, "Paradigma Perilaku Sosial dengan Pendekatan Behavioristik (Telaah atas Teori Burrhus Frederic Skinner)" (2016).
[27] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 35.

maupun pesantren. Pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan akhlak, moral, dan perilaku sosial peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Penerapan paradigma fakta sosial dalam pendidikan Islam tampak pada berbagai kegiatan, seperti pelaksanaan salat berjamaah, pembiasaan doa sebelum belajar, penegakan disiplin waktu, kewajiban berpakaian sesuai syariat, penghormatan kepada guru, hingga ketaatan pada tata tertib sekolah. Semua aturan dan kebiasaan tersebut menjadi bagian dari fakta sosial yang membentuk karakter peserta didik karena memiliki karakteristik yang bersifat umum, yakni penerapannya menyeluruh dan tidak terbatas pada individu tertentu, melainkan berlaku bagi seluruh anggota kelompok, sebagaimana bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai instrumen komunikasi universal bagi masyarakat.

Selain itu, fakta sosial bersifat memaksa atau *coercion*, yang mendorong individu untuk tunduk pada norma dan aturan yang berlaku baik tertulis maupun tidak, serupa dengan tuntutan pekerjaan bagi setiap orang untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Terakhir, fakta sosial bersifat eksternal karena berasal dari luar diri individu dan bukan muncul dari keinginan pribadi; hal ini terlihat ketika seseorang—seperti tenaga medis—dituntut oleh lingkungan profesionalnya untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai standar yang berlaku, terlepas dari kehendak pribadinya.

Pemikiran Para Tokoh Terkait Paradigma Fakta Sosial dan Implementasinya

Pemikiran Auguste Comte (a) Sosiologi sebagai Ilmu Pengetahuan Auguste Comte dikenal sebagai bapak sosiologi karena ia merupakan tokoh pertama yang memperkenalkan istilah sosiologi sebagai suatu disiplin ilmu yang mempelajari masyarakat secara ilmiah. Menurut Comte, masyarakat dapat diteliti menggunakan metode ilmiah sebagaimana ilmu-ilmu alam. Ia berpendapat bahwa fenomena sosial memiliki pola, keteraturan, serta hukum tertentu yang dapat diamati melalui observasi, eksperimen, dan perbandingan. Oleh karena itu, sosiologi harus berdiri sebagai ilmu yang objektif, sistematis, dan berdasarkan fakta empiris, bukan sekadar spekulasi filsafat semata.[28] Comte membagi sosiologi menjadi dua bagian utama, yaitu statika sosial dan dinamika sosial. Statika sosial membahas tentang keteraturan, stabilitas, dan struktur masyarakat, sedangkan dinamika sosial membahas perubahan dan perkembangan masyarakat dari waktu ke waktu. Menurutnya, masyarakat akan berkembang secara bertahap mengikuti hukum perkembangan tertentu yang dapat dipelajari secara ilmiah.[29] Dalam pandangan Comte, ilmu pengetahuan memiliki peranan penting dalam membangun masyarakat yang tertib dan maju. Ia percaya bahwa dengan memahami hukum-hukum sosial, manusia dapat menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan teratur. Oleh sebab itu, sosiologi dianggap sebagai ilmu tertinggi karena mempelajari kehidupan manusia secara menyeluruh.[30] (b) Konsep Positivisme Positivisme merupakan konsep utama yang dikembangkan oleh Auguste Comte. Positivisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa pengetahuan yang benar hanya dapat diperoleh melalui pengalaman nyata, pengamatan empiris, dan metode ilmiah. Comte

[28] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 34.
[29] George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 18.
[30] Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* (Jakarta: Gramedia, 1994), hlm. 42.

menolak penjelasan yang bersifat metafisik maupun teologis karena dianggap tidak dapat dibuktikan secara ilmiah.[31] Comte menjelaskan perkembangan pemikiran manusia melalui hukum tiga tahap (*law of three stages*). Tahap pertama adalah tahap teologis, yaitu ketika manusia menjelaskan segala sesuatu berdasarkan kekuatan supranatural atau kepercayaan kepada dewa-dewa. Tahap kedua adalah tahap metafisik, yaitu ketika manusia mulai menggunakan konsep abstrak dan filsafat dalam memahami dunia. Tahap ketiga adalah tahap positif, yaitu tahap ketika manusia menggunakan ilmu pengetahuan dan metode ilmiah untuk menjelaskan realitas sosial.[32] Dalam konteks pendidikan, positivisme memengaruhi cara berpikir bahwa pendidikan harus berorientasi pada fakta, observasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pendidikan dipandang sebagai sarana untuk membentuk masyarakat modern yang rasional, ilmiah, dan progresif.[33]

Pemikiran Emile Durkheim (a) Konsep Fakta Sosial Emile Durkheim merupakan tokoh sosiologi yang terkenal dengan konsep fakta sosial. Menurut Durkheim, fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir, dan merasakan yang berada di luar individu tetapi memiliki kekuatan memaksa terhadap individu tersebut. Fakta sosial dapat berupa norma, nilai, adat istiadat, hukum, dan aturan sosial yang mengatur kehidupan masyarakat.[34] Durkheim menjelaskan bahwa fakta sosial harus dipelajari sebagai sesuatu yang objektif dan nyata. Individu tidak dapat bertindak bebas sepenuhnya karena perilaku mereka dipengaruhi oleh struktur sosial di sekitarnya. Dengan demikian, masyarakat memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan individu.[35] Menurut Durkheim, pendidikan merupakan salah satu bentuk fakta sosial karena pendidikan berfungsi menanamkan norma, nilai, dan budaya masyarakat kepada generasi muda. Pendidikan tidak hanya mengembangkan kemampuan individu, tetapi juga membentuk kesadaran kolektif agar masyarakat tetap teratur dan stabil.[36] (b) Pendidikan sebagai Alat Pembentuk Keteraturan Sosial Durkheim memandang pendidikan sebagai alat penting untuk menciptakan keteraturan sosial. Pendidikan berfungsi membentuk moralitas, disiplin, dan rasa tanggung jawab sosial pada diri individu. Melalui pendidikan, individu belajar mengenai aturan sosial yang berlaku sehingga mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat.[37] Menurut Durkheim, sekolah memiliki peranan sebagai lembaga sosial yang menanamkan solidaritas sosial. Dalam masyarakat modern, solidaritas tidak lagi didasarkan pada kesamaan, tetapi pada pembagian kerja dan saling ketergantungan antarindividu. Oleh karena itu, pendidikan diperlukan untuk membentuk individu yang mampu bekerja sama dan menghargai aturan sosial.[38] Durkheim juga menekankan pentingnya pendidikan moral dalam membangun masyarakat yang harmonis. a berpendapat bahwa tanpa pendidikan moral, masyarakat akan mengalami *anomie*, yaitu keadaan ketika norma sosial melemah sehingga menimbulkan kekacauan sosial.

---

[31] Auguste Comte, *The Positive Philosophy* (New York: AMS Press, 1974), hlm. 11.
[32] George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 20.
[33] S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 25.
[34] Emile Durkheim, *The Rules of Sociological Method* (New York: Free Press, 1982), hlm. 50.
[35] Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* (Jakarta: Gramedia, 1994), hlm. 103.
[36] Emile Durkheim, *Education and Sociology* (New York: Free Press, 1956), hlm. 71.
[37] S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 40.
[38] George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 89.

Pemikiran Karl Marx (a) Konflik Sosial dalam Masyarakat Karl Marx dikenal sebagai tokoh teori konflik yang memandang masyarakat selalu berada dalam pertentangan antara kelompok yang berkuasa dan kelompok yang tertindas. Menurut Marx, konflik sosial muncul karena adanya ketimpangan kepemilikan alat produksi dalam sistem kapitalisme. Masyarakat terbagi menjadi dua kelas utama, yaitu kaum borjuis sebagai pemilik modal dan kaum proletar sebagai pekerja.[39] Marx berpendapat bahwa kaum borjuis menggunakan kekuasaan ekonomi untuk mengendalikan masyarakat, termasuk dalam bidang politik, hukum, dan pendidikan. Akibatnya, terjadi eksploitasi terhadap kaum proletar yang hanya memiliki tenaga kerja untuk dijual.[40] Dalam pandangan Marx, perubahan sosial terjadi melalui konflik kelas. Ketika ketidakadilan semakin besar, kaum proletar akan melakukan perlawanan terhadap kaum borjuis untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas yang lebih adil dan setara.[41] (b) Pengaruh Kondisi Sosial terhadap Pendidikan Karl Marx memandang pendidikan sebagai bagian dari struktur sosial yang dipengaruhi oleh sistem ekonomi. Dalam masyarakat kapitalis, pendidikan sering digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan kelas dominan. Kurikulum, aturan sekolah, dan sistem pendidikan dirancang untuk mendukung kepentingan kaum penguasa.[42] Menurut Marx, pendidikan dapat menciptakan ketimpangan sosial karena akses terhadap pendidikan berkualitas lebih mudah diperoleh oleh kelompok ekonomi atas. Sementara itu, kelompok masyarakat miskin sering mengalami keterbatasan kesempatan pendidikan sehingga kesenjangan sosial terus berlangsung. Namun demikian, Marx juga melihat bahwa pendidikan dapat menjadi sarana perubahan sosial apabila digunakan untuk membangun kesadaran kritis masyarakat. Pendidikan yang membebaskan dapat membantu masyarakat memahami ketidakadilan sosial dan mendorong terciptanya perubahan menuju masyarakat yang lebih setara.

Pemikiran Lewis Coser Lewis Coser merupakan tokoh sosiologi yang mengembangkan teori konflik sosial dengan pendekatan yang lebih positif dibandingkan Karl Marx. Menurut Coser, konflik tidak selalu bersifat merusak, tetapi juga dapat memiliki fungsi sosial tertentu dalam masyarakat. Coser menjelaskan bahwa konflik dapat memperkuat solidaritas kelompok karena anggota kelompok menjadi lebih bersatu ketika menghadapi ancaman dari luar. Konflik juga dapat membantu masyarakat menemukan solusi baru terhadap masalah sosial yang muncul.[43] Menurut Coser, konflik yang terjadi dalam batas tertentu justru dapat menjaga keseimbangan sosial. Konflik memungkinkan terjadinya perubahan dan penyesuaian sosial sehingga masyarakat tidak mengalami stagnasi.[44] Oleh sebab itu, konflik dipandang sebagai bagian alami dari kehidupan sosial. Dalam konteks pendidikan, pemikiran Lewis Coser dapat dipahami bahwa perbedaan pendapat, persaingan, maupun konflik di lingkungan pendidikan dapat menjadi sarana pembelajaran sosial. Konflik yang dikelola dengan baik dapat

[39] Karl Marx dan Friedrich Engels, *Manifesto of the Communist Party* (London: Penguin Books, 2002), hlm. 15.
[40] George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 132.
[41] Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* (Jakarta: Gramedia, 1994), hlm. 140.
[42] Paulo Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas* (Jakarta: LP3ES, 2008), hlm. 56.
[43] George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 166.
[44] Lewis A. Coser, *The Functions of Social Conflict* (New York: Free Press, 1956), hlm. 31.

melatih kemampuan berpikir kritis, toleransi, dan kemampuan menyelesaikan masalah secara demokratis.[45]

Pemikiran Ibnu Khaldun (a) Konsep Masyarakat Ibnu Khaldun merupakan tokoh Muslim yang terkenal melalui karya monumentalnya, yaitu *Muqaddimah*. Ia menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri sehingga membutuhkan kerja sama dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari kerja sama tersebut terbentuklah masyarakat dan peradaban.[46] Ibnu Khaldun memperkenalkan konsep *ashabiyah*, yaitu solidaritas atau ikatan sosial yang menjadi dasar kekuatan suatu kelompok masyarakat. Menurutnya, masyarakat yang memiliki solidaritas kuat akan lebih mampu membangun peradaban yang maju dan bertahan lama.

Selain itu, Ibnu Khaldun juga menjelaskan bahwa kondisi geografis, ekonomi, budaya, dan lingkungan sosial sangat memengaruhi perkembangan masyarakat. Perubahan sosial terjadi secara bertahap sesuai dengan dinamika kehidupan manusia dan perkembangan peradaban.[47] (b) Pendidikan dan Pengaruh Sosial terhadap Perilaku Manusia Dalam pandangan Ibnu Khaldun, pendidikan memiliki peranan penting dalam membentuk akhlak, intelektual, dan perilaku manusia. Pendidikan tidak hanya bertujuan memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan moral individu agar mampu hidup bermasyarakat dengan baik. Ibnu Khaldun menekankan bahwa lingkungan sosial sangat memengaruhi perilaku manusia. Kebiasaan, budaya, dan pola kehidupan masyarakat akan membentuk cara berpikir dan sikap seseorang. Oleh sebab itu, pendidikan harus memperhatikan kondisi sosial dan lingkungan tempat peserta didik hidup.[48] Menurut Ibnu Khaldun, proses pendidikan sebaiknya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan peserta didik. Guru tidak boleh menggunakan kekerasan dalam mendidik karena hal tersebut dapat merusak perkembangan mental dan kreativitas anak. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi manusia secara seimbang antara aspek intelektual, moral, dan sosial.[49]

Analisis Kasus Pendidikan dengan Pendekatan Fakta Sosial

Fenomena menurunnya disiplin dan etika peserta didik saat ini menjadi salah satu persoalan pendidikan yang banyak terjadi di lingkungan sekolah. Bentuknya dapat berupa keterlambatan masuk sekolah, kurangnya rasa hormat kepada guru, pelanggaran tata tertib, penggunaan bahasa yang kurang sopan, hingga rendahnya tanggung jawab dalam belajar. Permasalahan ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial yang berkembang di masyarakat.[50]

Dalam perspektif Emile Durkheim, perilaku peserta didik dapat dianalisis melalui konsep fakta sosial. Durkheim menjelaskan bahwa fakta sosial merupakan cara bertindak, berpikir, dan merasa yang berada di luar individu namun memiliki

[45] S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 83.
[46] Ibnu Khaldun, *Muqaddimah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 97.
[47] Ali Abdul Wahid Wafi, *Ibnu Khaldun: Riwayat dan Karyanya* (Jakarta: Grafiti Press, 1985), hlm. 56.
[48] Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2015), hlm. 201.
[49] Hasan Langgulung, *Asas-Asas Pendidikan Islam* (Jakarta: Pustaka Al Husna, 2003), hlm. 98.
[50] Hasan Langgulung, *Asas-Asas Pendidikan Islam* (Jakarta: Pustaka Al Husna, 2003), hlm. 98.

kekuatan memaksa terhadap individu tersebut.Norma, aturan sekolah, budaya masyarakat, serta lingkungan pergaulan termasuk bagian dari fakta sosial yang memengaruhi perilaku siswa.[51]

Menurunnya disiplin peserta didik dapat dipahami sebagai akibat melemahnya kontrol sosial dalam lingkungan pendidikan dan keluarga. Aturan sekolah yang tidak diterapkan secara konsisten menyebabkan siswa kurang memiliki rasa takut terhadap pelanggaran. Selain itu, perubahan sosial di era digital membuat peserta didik lebih banyak terpengaruh oleh media sosial dan lingkungan virtual dibandingkan nilai-nilai pendidikan yang diajarkan di sekolah.[52]

Durkheim memandang pendidikan sebagai alat pembentuk keteraturan sosial. Sekolah memiliki fungsi menanamkan nilai moral, kedisiplinan, serta tanggung jawab sosial kepada peserta didik agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Ketika fungsi tersebut melemah, maka akan muncul kondisi yang disebut *anomie*, yaitu keadaan ketika norma sosial tidak lagi memiliki kekuatan yang kuat dalam mengatur perilaku individu.[53]

Kasus rendahnya etika peserta didik juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial keluarga. Kurangnya pengawasan orang tua, minimnya pendidikan karakter di rumah, serta perubahan pola komunikasi dalam keluarga menyebabkan anak kehilangan figur sosial yang dapat menjadi teladan. Dalam pendekatan fakta sosial, perilaku individu tidak terbentuk secara alami, melainkan dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat individu tersebut hidup dan berkembang.[54]

Selain itu, pengaruh kelompok sebaya juga menjadi fakta sosial yang kuat dalam kehidupan peserta didik. Siswa cenderung mengikuti perilaku kelompok agar diterima dalam lingkungan pergaulan mereka. Jika lingkungan sosial yang dominan memiliki budaya melanggar aturan, maka individu dalam kelompok tersebut akan terdorong melakukan tindakan serupa.[55]

Berdasarkan analisis tersebut, solusi yang dapat dilakukan adalah memperkuat fungsi pendidikan sebagai lembaga pembentuk moral sosial. Sekolah perlu menanamkan pendidikan karakter, meningkatkan ketegasan terhadap aturan, serta membangun kerja sama antara guru, orang tua, dan masyarakat Pendidikan moral tidak cukup hanya melalui teori, tetapi juga melalui pembiasaan sosial yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.[56]

Dengan demikian, pendekatan fakta sosial menunjukkan bahwa masalah pendidikan bukan hanya persoalan individu peserta didik, tetapi berkaitan erat dengan norma, lingkungan sosial, budaya, dan struktur masyarakat yang memengaruhi perilaku mereka. Oleh sebab itu, penyelesaian masalah pendidikan harus dilakukan secara kolektif melalui penguatan nilai sosial dan fungsi lembaga pendidikan dalam masyarakat.

KESIMPULAN

[51] Emile Durkheim, *The Rules of Sociological Method* (New York: Free Press, 1982), hlm. 50.
[52] George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 91.
[53] Emile Durkheim, *Education and Sociology* (New York: Free Press, 1956), hlm. 71.
[54] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 143.
[55] Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* (Jakarta: Gramedia, 1994), hlm. 108.
[56] S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 67.

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, paradigma dalam teori sosial menurut Ritzer (2005) dan Erving Goffman terbagi menjadi tiga jenis utama, yaitu paradigma fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Paradigma fakta sosial menekankan bahwa kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh struktur sosial, norma, serta aturan yang berada di luar kontrol langsung individu. Sementara itu, paradigma definisi sosial berfokus pada cara individu memberi makna dan memahami tindakan sosial dalam interaksi sehari-hari, sedangkan paradigma perilaku sosial memandang perilaku manusia sebagai bentuk respons atau pengaruh dari stimulus lingkungan sekitarnya.

Dalam ranah pendidikan Islam baik yang diselenggarakan di sekolah, madrasah, maupun pesantren. ketiga paradigma tersebut terefleksi secara nyata Pendidikan Islam tidak sekadar berfungsi sebagai media transfer ilmu pengetahuan, melainkan juga instrumen penting dalam pembentukan akhlak, moral, serta perilaku sosial peserta didik agar selaras dengan nilai-nilai keislaman. Pemikiran ini diperkuat oleh kontribusi para tokoh sosiologi klasik dan pemikir Muslim. Auguste Comte menekankan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan melalui konsep positivisme, sedangkan Émile Durkheim memposisikan fakta sosial dan pendidikan sebagai alat pembentuk keteraturan sosial. Di sisi lain, Karl Marx menyoroti pengaruh konflik sosial dan kondisi material terhadap sistem pendidikan, sementara Ibnu Khaldun menggarisbawahi bahwa dinamika masyarakat dan lingkungan sosial memiliki pengaruh langsung terhadap karakter serta perilaku manusia.

Fenomena menurunnya disiplin dan etika peserta didik yang marak terjadi saat ini—seperti keterlambatan masuk sekolah, berkurangnya rasa hormat kepada guru, pelanggaran tata tertib, penggunaan bahasa yang kurang sopan, hingga rendahnya tanggung jawab belajar—merupakan tantangan nyata dalam dunia pendidikan. Melalui kacamata sosiologi, permasalahan tersebut tidak dapat dipandang belaka sebagai kegagalan atau faktor individu semata. Permasalahan ini berkaitan erat dengan kondisi sosial yang berkembang di masyarakat, seperti melemahnya kontrol sosial, perubahan budaya pergaulan, serta pergeseran nilai dalam lingkungan keluarga dan media. Oleh karena itu, penanganan krisis etika dan disiplin peserta didik memerlukan sinergi menyeluruh antara penegakan aturan kelembagaan, pembiasaan lingkungan yang positif, serta penguatan kembali nilai-nilai moral dalam pendidikan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Arif, Ariffudin M. "Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim dalam Sosiologi Pendidikan." *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 1, No. 2, 2020.

Blumer, Herbert. *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. California: University of California Press, 1969.

Comte, Auguste. *The Positive Philosophy*. New York: AMS Press, 1974.

Coser, Lewis A. *The Functions of Social Conflict*. New York: Free Press, 1956.

Durkheim, Emile. *Education and Sociology*. New York: Free Press, 1956.

Durkheim, Emile. *The Rules of Sociological Method*. New York: Free Press, 1982.

Faikar Urfan, Noveri, et al. "Paradigma Dasar dalam Kajian Ilmu Sosial." Vol. 2, No. 1, 2024.

Freire, Paulo. *Pendidikan Kaum Tertindas*. Jakarta: LP3ES, 2008.

Johnson, Doyle Paul. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia, 1994.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. *Profil Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Kemendikbudristek, edisi terbaru.

Khaldun, Ibnu. *Muqaddimah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.

Langgulung, Hasan. *Asas-Asas Pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka Al Husna, 2003.

Malik, Abdul, dan Aris Dwi Nugroho. "Menuju Paradigma Penelitian Sosiologi yang Interaktif." *Sosiologi Reflektif*, Vol. 10, No. 2, 2016.

Marilang, dan Elsa Wildia Bahar. "Paradigma dan Konsep Integrasi Ilmu." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 12, 2024.

Marx, Karl, dan Friedrich Engels. *Manifesto of the Communist Party*. London: Penguin Books, 2002.

Muslim. "Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode dan Jenis Penelitian dalam Ilmu Komunikasi." *Wahana*, Vol. 10, No. 1, 2015.

Mustaqim. "Paradigma Perilaku Sosial dengan Pendekatan Behavioristik (Telaah atas Teori Burrhus Frederic Skinner)." 2016.

Nasution, S. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Ramayulis. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2015.

Revita Ika. "Paradigma Fakta Sosial dalam Pendidikan Karakter Jujur pada Peserta Didik SMPIT Insan Kamil Karanganyar." *Sosialitas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Sosiologi-Antropologi*, 2015.

Ritzer, George. *Sociological Theory*. 9th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2013.

Ritzer, George. *Sociology: A Multiple Paradigm Science*. Boston: Allyn and Bacon, 1975.

Ritzer, George. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana, 2012.

Skinner, B. F. *Beyond Freedom and Dignity*. New York: Knopf, 1971.

Skinner, B. F. *Science and Human Behavior*. New York: Macmillan, 1953.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.

Susanto, Happy. "Konsep Paradigma Ilmu-ilmu Sosial dan Relevansinya bagi Perkembangan Pengetahuan." *Jurnal Muaddib*, Vol. 4, No. 2, 2014.

Wafi, Ali Abdul Wahid. *Ibnu Khaldun: Riwayat dan Karyanya*. Jakarta: Grafiti Press, 1985.

Wagiyo, dkk. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2011.

Yusuf, Akhyar. "Paradigma Ilmiah pada Sosial-Budaya Kontemporer." *Jurnal Kajian Budaya*, Vol. 1, No. 2, 2011.

Sastra, Alihan, dkk. "Hakikat Dasar dan Tujuan Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Nusantara*, Vol. 2, 2025.